

Membangun Konstituen dari Dasar: Studi Kasus Kalimantan Timur

PUTUT ARYO SAPUTRO

Kontestasi Pemilu Legislatif telah memberikan kesempatan bagi kelompok warga untuk memperjuangkan agenda perubahan melalui jalur politik. Dibukanya ruang-ruang demokrasi memungkinkan aktor-aktor dari kelompok warga untuk berkompetisi secara langsung dalam Pemilihan Umum. Intensitas relasi dan interaksi yang terbentuk antara pemilih dan wakilnya melalui program-program yang disepakati dan diperjuangkan bersama dapat mempersempit jurang representasi yang oleh beberapa ahli (Törnquist dan Stoke 2009), ditengarai telah mengalami defisit.¹ Artikel ini memaparkan hubungan antara kandidat dari latar belakang aktivis lingkungan dan konstituen yang sama-sama memiliki latar belakang pedesaan, korban pengrusakan lingkungan, dan komunitas pendatang di Kalimantan Timur dalam bingkai representasi yang dikontestasikan dalam ruang-ruang politik elektoral (political space). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pada pemilih tradisional, kesamaan nasib, identitas dan kemampuan aktor untuk mendistribusi sumber daya negara berperan penting dalam membentuk relasi antara wakil politik dengan konstituen.

Pengantar

Eksplotasi yang tak terkendali terhadap kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Timur telah menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan, meluasnya ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik berkepanjangan antara perusahaan dengan penduduk sekitarnya. Namun pada saat yang sama relasi antara negara dan kapital tidak mengalami perubahan, *crony capitalist* masih tetap menjadi modus operandi penyelenggara negara dan kelompok bisnis dalam mendapatkan konsesi, monopoli, dan lisensi.² Hal tersebut juga dibarengi dengan semakin langgengnya aliansi kekuasaan lokal berbasis patronase dan korupsi yang semakin

¹ Törnquist, O.; Webster, N.; and Stokke, K. (eds) (2009), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave Macmillan.

² Robison, R., & Hadiz, V. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Market*. London: Routledge. 2004

merajalela.³ Situasi ini lambat laun menumbuhkan gerakan-gerakan perlawanan dari masyarakat yang dimotori oleh organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dalam isu lingkungan.

Salah satu organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap dampak buruk eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur adalah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Didirikan oleh berbagai elemen masyarakat terutama korban tambang dan aktivis lingkungan pada pertengahan tahun 90-an, kini Jatam menjadi organisasi yang paling lantang menyuarakan dampak buruk eksploitasi sumber daya alam, penghentian izin dan aktivitas pertambangan, melalui advokasi, pendampingan korban tambang, riset, dan kampanye penyadaran publik. Pada awal terbentuknya Jatam Kaltim pada akhir tahun 90-an, Kutai Kartanegara menjadi salah fokus utama organisasi karena sejak zaman Belanda hingga saat ini menjadi pusat pengeboran minyak dan gas bumi oleh perusahaan nasional maupun multinasional. Permasalahan muncul ketika mereka (perusahaan Migas) mulai mencemari lingkungan yang berdampak pada rusaknya mata pencaharian utama warga yang bersumber dari pertanian dan tambak-tambak ikan tradisional. Selain itu, ekspansi perusahaan Migas juga menimbulkan masalah baru, yakni penggusuran.

Melalui pengorganisasian dan pendampingan masyarakat korban pertambangan Migas, beberapa warga setempat mulai bergabung menjadi relawan Jatam. Salah satunya adalah Baharuddin Demmu (Bahar), seorang mahasiswa Universitas Mulawarman, yang keluarganya juga menjadi korban tambang Migas. *Mengapa saya bergabung (dengan Jatam), karena saya sendiri merupakan korban tambang. Orang tua saya adalah petani yang harus menghidupi 5 orang anak, baik tempat tinggal maupun ladang digusur Chevron. Untuk membangun rumah kami harus mengumpulkan papan-papan bekas dan bongkahan-bongkahan bangunan yang ditinggalkan orang, kami tidak punya uang dan tidak tahu harus hidup dari apa. Pihak perusahaan selalu menggunakan aparat militer untuk melakukan aksinya. Saya ingat betul, kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1986. Saat itulah saya sadar bahwa perubaan migaslah yang menyebabkan penderitaan itu. Karena menjadi korban itulah saya tergerak untuk melakukan perlawanan dengan bergabung di Jatam⁴.* Intensitas pendampingan dan advokasi yang dilakukannya sejak tahun 90-an membawanya menjadi koordinator Jatam Kaltim dari tahun 2002 hingga tahun 2006.

Pada berbagai kesempatan warga melihat bahwa perusahaan selalu mendatangi kepala desa untuk meminta izin beroperasi dan memperpanjang aktivitas. Dalam banyak hal, warga cenderung tidak dilibatkan ketika kepala desa melakukan kesepakatan dengan perusahaan. Pengusaha cukup menjalin relasi yang kuat dengan penguasa, dari atas sampai bawah tanpa perlu melibatkan kelompok-kelompok

³ Winters, J.A. *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. In M. Ford, & T. Pepensky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: Cornell University Press. 2014

⁴ Wawancara penulis dengan Baharuddin Demmu, 15 Mei 2015.

masyarakat di sekitar perusahaan. Robison (1986) mencatat bahwa cara-cara klientelistik seperti ini menjadi fondasi hubungan antara pengusaha dan penguasa untuk urusan lisensi dan hak-hak istimewa⁵. Tidak terwakilinya warga desa terhadap pemimpinnya menyebabkan mereka berkesimpulan bahwa penting untuk memiliki kepala desa dari kalangan mereka sendiri, yakni korban perusahaan Migas. Pada saat itulah, warga meminta Bahar mencalonkan menjadi Kepala Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu, dimana perusahaan Migas multinasional, seperti Total, Vico, Unocal dan Chevron beroperasi. Tujuan utama dari strategi memajukan calon dari kalangan tersebut adalah agar masyarakat memiliki peran dan dilibatkan dalam proses negosiasi rantai perizinan perusahaan migas.

Solidaritas dan *trust* yang dibangun melalui pertemuan-pertemuan rutin yang digagas oleh aktivis lingkungan pendamping, baik formal maupun informal dengan masyarakat untuk membahas masalah bersama ketika menghadapi perusahaan migas yang telah merusak mata pencaharian mereka, dan masalah sehari-hari dengan petani, nelayan dan pedagang kecil kemudian memunculkan apa yang dikenal dengan modal sosial. Konsep modal sosial mengacu pada kesukarelaan, pertemanan, simpati, dan hubungan sosial antara individu dan keluarga hingga membentuk satu unit sosial. Salah satu ukuran dari modal sosial adalah keterlibatan warga dalam sebuah kelompok, perhimpunan, organisasi sosial secara sukarela karena didorong oleh kepentingan bersama. Adapun motivasi anggota kelompok masyarakat untuk menggali informasi dan mencari solusi dari perkumpulan warga mengenai masalah sehari-hari yang mereka alami merupakan pintu masuk untuk memperoleh dukungan politik.⁶

Modal sosial ini kemudian menjadi amunisi mereka saat pemilihan kepala desa. Ketika pemilihan digelar tahun 2003 Bahar mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat. Meskipun demikian proses ini tidak berjalan mulus, kemenangannya tidak dikehendaki oleh penguasa saat itu. Camat Marangkayu misalnya, melihat kemenangan ini sebagai ancaman terhadap perusahaan-perusahaan migas di daerahnya dan mengganggu perolehan suara Partai Golkar. Kekhawatiran yang sama juga muncul dari Bupati Kutai Kartanegara. Melalui sebuah proses yang dinilai oleh banyak pihak sebagai rekayasa, calon kepala desa yang tidak terpilih melaporkan terjadi kecurangan pada proses pemilihan. Atas laporan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara yang saat itu dijabat oleh H. Syaukani tidak melantik Bahar sebagai kepala desa meski telah dipilih mayoritas warga. Apa yang terjadi disini dapat menjadi cerminan bahwa aktor-aktor dalam bisnis pertambangan Migas secara luas mendapatkan akses kontrak, konsesi dan proteksi melalui jalur politik dengan melibatkan penguasa-penguasa di daerah. Meski proses demokrasi dijalankan namun kekuasaan tetap berada di tangan H.Syaukani sebagai porosnya.

⁵ Lihat Robison, R. *Indonesia: The Rise of Capital*. Allen and Unwin, Sydney, 1986

⁶ Putnam, Robert. *Making Democracy Work*. Princeton University Press. 1993

Aksi protes melalui demonstrasi di kantor bupati dan kantor DPRD Kab. Kutai Kartanegara tidak pernah membuahkan hasil. Selama hampir tiga tahun melakukan demonstrasi, keputusan pemerintah daerah tidak berubah. Sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi membuat peta perjuangan berubah, yakni ketika H. Syaukani diberhentikan sebagai Bupati Kutai Kartanegara karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2006. Pendukung Bahar melihat hal ini sebagai momentum tepat untuk mewujudkan apa yang selama ini diperjuangkan. Mereka meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyiapkan pemilihan kepala desa ulang. Ketika pemilihan kembali digelar pada tahun 2006, tidak lama setelah H. Syaukani ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Bahar kembali mendapatkan suara terbanyak. Kemudian akhirnya Bahar dilantik secara resmi oleh pemerintah daerah.

Representasi Warga di Tingkat Desa

Posisi kepala desa yang muncul dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat terorganisir sebagai korban pertambangan membuat representasi hadir dalam bentuk nyata. Berbeda dengan konsep representasi yang secara sederhana diartikan sebagai menghadirkan yang tidak ada atau tidak hadir.⁷ Relasi dan interaksi antara Bahar dan pendukungnya ketika proses pemilihan kepala desa menjadi contoh bagaimana proses menghadirkan kepentingan kelompok (korban pertambangan) dalam politik formal (elektoral). Dengan memiliki wakil dari kalangan mereka sendiri, para korban eksploitasi sumber daya alam ini menyadari bahwa perusahaan bukanlah satu-satunya pihak yang menyebabkan mereka menderita, namun ada faktor lain yakni negara. Secara struktural negaralah yang harus bertanggung jawab ketika kesejahteraan rakyatnya terabaikan. Negara yang selama ini berada di luar jangkauan mereka mulai nampak sebagai pihak yang layak dituntut untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan warganya *Hidup kita sudah diatur oleh negara, mau bicara pertanian ada dinas pertanian, bicara peternakan ada dinas peternakan, mau bicara tambak ada dinas perikanan, mau bicara sekolah ada dinas pendidikan. Tapi semuanya belum pernah kita rasakan seperti apa disini (desa).*⁸

Warga Desa Marangkayu beranggapan bahwa peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan harus terwujud ke program-program pembangunan desa. Sementara itu, distribusi sumber daya yang berasal dari negara berupa program pemerintah selama ini hanya bisa diakses oleh segelintir orang dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah mulai dipertanyakan. Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua program untuk pengembangan wilayah desa, pertama Gerbang Dayaku. Sebuah program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melihat usulan dari desa

⁷ Soeseno, Nuri. *Representasi Politik: Perkembangan Dari Ajektiva ke Teori*. Puskapol UI. 2013

⁸. Wawancara penulis dengan Doddy, Warga Marangkayu 23 Mei 2015.

dan kecamatan. Kedua, Alokasi Dana Desa (ADD) berupa uang tunai yang penggunaannya dapat ditentukan secara langsung oleh pemerintah desa tanpa melalui kecamatan, selain itu juga memungkinkan warga untuk mengelola keuangannya secara bersama-sama. Menurut warga desa Marangkayu, mereka tidak merasakan dampak dari program-program yang didanai pemerintah daerah tersebut. Tidak ada proyek pembangunan desa yang terlaksana dari dana-dana tersebut, jalan tetap rusak, tanggul air tidak terawat, saluran irigasi ter bengkalai dan tidak ada satupun program peningkatan ekonomi rakyat maupun pemberdayaan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut warga desa menuntut agar dana-dana bantuan dari pemerintah tersebut dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat dengan cara meminta kepala desa untuk merekrut orang baru yang memiliki keahlian pembukuan keuangan untuk menjadi Kaur (Kepala Urusan) keuangan desa. Setelah memiliki Kaur keuangan baru sesuai permintaan warga, langkah berikutnya adalah pemetaan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kehidupannya lebih baik. Kepala desa yang memiliki latar belakang aktivis ini kemudian meminta semua orang mengawasi keuangan desa agar bantuan dapat disalurkan secara terbuka dan tepat sasaran. Di samping itu, melalui forum-forum warga, mereka berpendapat jika bantuan dari pemerintah disalurkan semuanya, tidak dicuri aparat desa dan pegawai kecamatan maka warga akan sejahtera. Pengalaman menjadi kepala desa memberikan pemahaman bahwa modal utama yang harus dimiliki agar masyarakat sejahtera adalah pengetahuan mengenai budgeting, seluk beluk proyek infrastruktur, berbagai bantuan pemerintah beserta sumbernya dan regulasi pemerintah yang terkait anggaran.

Sementara itu, perluasan pengetahuan yang dipelajari dari pengalaman juga terjadi pada Forum Musrenbang Kabupaten misalnya, Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat harus mengetahui secara detail rencana kegiatan pembangunan dan berapa anggarannya, terlebih untuk proyek infrastruktur jika ingin daerahnya mendapat perhatian pemerintah. Di forum Musrenbang, jika argumen kepala desa lemah maka akan banyak proyek pembangunan yang tidak tersalurkan sampai ke desa dan bantuan yang tidak sesuai besarnya. Kepala Desa juga harus rajin menjalin komunikasi dengan masyarakat agar aspirasi mereka benar-benar terjaga caranya adalah jika ada anggaran yang sudah ditetapkan untuk satu desa, namun tidak kunjung datang maka masyarakat dapat bersama-sama menuntut haknya. Pada level inilah masyarakat di Marangkayu meleak anggaran dan memiliki pengetahuan jika bantuan atau proyek pembangunan tidak sampai desa maka berarti ada penyimpangan.

Dari Kepala Desa Menjadi Anggota Dewan

Warga desa masih menyimpan memori aksi protes yang dilakukan di DPRD Kalimantan Timur ketika menuntut kepala desa segera dilantik. Strategi yang mereka lakukan tidak hanya datang dan kemudian berorasi di depan gedung, namun juga melakukan komunikasi intensif dengan anggota dewan yang mereka kenal. Fenomena

ini mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap anggota dewan agar mereka dapat berkontribusi langsung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian Baharuddin Demmu (Bahar) mendapat banyak masukan dan dukungan dari Darlis Pattalongi, anggota DPRD Kaltim dalam dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) dari Partai Amanat Nasional. Keduanya saling mengenal sejak keduanya kuliah di Universitas Mulawarman dan sama-sama anggota KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan).

Sementara itu, salah satu sumberdaya negara yang dapat menyentuh langsung konstituen adalah dana aspirasi, yakni anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk setiap anggota DPRD dengan tujuan memberikan bantuan proyek pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan konstituen yang ada di Dapil mereka. *“Ketika masyarakat desa memilih, orang yang bersangkutan (caleg) harus didorong untuk berbuat, seorang anggota Dewan menjadi penting kalau dia benar-benar mau berbuat untuk masyarakat, kalau masyarakat membutuhkan jalan maka pembangunan jalan tersebut harus menjadi kenyataan sehingga pemilih mengetahui bahwa dukungan yang diberikan tidaklah sia-sia⁹”*. Secara teknis anggota Dewan akan merekomendasikan proposal program ke Eksekutif yang kemudian keluar dalam bentuk kegiatan pemerintah dan proyek-proyek infrastruktur. Sedangkan dana aspirasi biasanya dititipkan dalam bantuan sosial (bansos) melalui masing-masing SKPD. Ketika menjadi Kepala Desa, Bahar dan pendukungnya juga memastikan program dan bantuan pemerintah yang bersifat *clubs goods* tersebut sampai tujuan dan tepat sasaran, yakni mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dana yang bersumber dari APBD pada umumnya digunakan anggota dewan untuk memperluas basis politik. Salah satu tujuan anggota dewan dalam mendorong terlaksananya program-program populis adalah meningkatkan popularitas (*credit claiming*) dan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok sosial ekonomi untuk memobilisir dukungan suara. Kajian Institute for Strategic Initiatives (2014) menyebutkan bahwa efektifitas penggunaan dana publik/APBD untuk kampanye tergantung dari konteks struktural, relasi antara pemilih dan politisi, model/tipe bantuan, dan proses penyaluran bantuan-bantuan tersebut.

Melihat peran anggota legislatif yang begitu besar, Bahar yang pada saat itu menjadi kepala desa didorong oleh pendukungnya untuk menjadi anggota dewan. Melalui dinamika relasi dan interaksi dengan representasi mereka di Desa, warga masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa anggota dewan dapat diminta untuk memperjuangkan permasalahan pertambangan, membantu pendanaan untuk kesejahteraan dan infrastruktur sehingga warga Marangkayu berharap ada wakil mereka di DPRD. Selain itu, dorongan menjadi anggota dewan juga datang dari Darlis agar Bahar mendaftar sebagai Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN). Ketika pendukungnya menyatakan siap untuk masuk ke dalam gerakan politik yang lebih luas dengan menjadi konstituen dan relawan, maka pada bulan Februari tahun 2009, Bahar

⁹. Wawancara penulis dengan Lukman, Anggota Kelompok Tani Marangkayu, 19 Mei 2015.

mengundurkan diri dari jabatan kepala desa untuk berkompetisi di pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu, sistem proporsional daftar terbuka yang digunakan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 berimplikasi pada pengerahan sumber daya personal kandidat. Kampanye dilakukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan partai politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka mengubah arah dan tujuan kampanye kandidat legislatif. Seorang calon legislatif di kabupaten atau provinsi tidak hanya bersaing dengan calon lain dari partai yang berbeda, namun dari partai yang sama dalam banyak hal justru menjadi pesaing utama. Fenomena yang terjadi kemudian adalah munculnya kerja sama diantara kandidat satu partai di Dapil yang sama, namun berbeda level kursinya. Kerja sama ini dimungkinkan karena para kandidat tidak bersaing memperebutkan kursi yang sama sehingga mereka akan bersatu untuk memenangkan suara di Dapil yang sama. Di Kaltim, misalnya, dikenal dengan istilah “se-paket” untuk PAN paket kandidatnya adalah Darlis Pattarongi untuk DPRD Provinsi dan Baharuddin Demmu untuk DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. *Platform* kampanye mereka relatif sama, yaitu persoalan pencemaran lingkungan, akses masyarakat yang lebih besar terhadap anggaran daerah, dan pembangunan jalan di Dapil.

Keberhasilan Bahar dalam menjamin program infrastruktur pemerintah dapat terlaksana di beberapa kecamatan (yang diantaranya *clubs goods*) dampingannya dan juga bantuan-bantuan untuk peningkatan kesejahteraan warga dari anggota dewan membuatnya dapat dengan mudah mendapatkan suara ketika pemilihan legislatif kabupaten. Tim sukses yang kebanyakan berasal dari desanya dengan mudah mengenalkan dirinya ketika ‘contoh nyata’ (istilah untuk bantuan pemerintah yang langsung dapat dilihat seperti jalan, alat bantu pertanian, perikanan, dll.) dapat dirasakan oleh semua orang. Warga desa lain juga diberikan contoh marangkayu yang semakin maju karena berhasil mewujudkan bantuan-bantuan yang selama ini tidak dapat dirasakan kehadirannya. *Credit claiming* tersebut berubah menjadi suara ketika pemilu legislatif berlangsung. Bahar terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Darlis Pattalongi terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai pendatang baru di partai politik, namun Bahar meraih suara terbanyak dari Caleg PAN kabupaten di seluruh Kalimantan Timur. Bahar kemudian ditunjuk menjadi ketua fraksi. Tidak beberapa lama kemudian ditunjuk menjadi ketua komisi. Pengetahuan mengenai anggaran yang didapat ketika menjadi kepala desa membuat Bahar percaya diri duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena menjadi salah satu orang yang paling vokal menyuarakan korban pengrusakan lingkungan oleh perusahaan tambang Migas dan memiliki banyak pendukung baik di dalam maupun di luar gedung legislatif, Bahar kemudian ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPRD. Posisi Wakil Ketua tersebut merupakan daya tawar yang

sangat besar ketika memanggil perusahaan-perusahaan ekstraktif yang bermasalah dengan warga.

Menjadi Penghubung Antar Konstituen

Sistem kekerabatan bilateral (garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu) orang Bugis tidak mengenal marga. Percabangan dari kedua sisi nenek moyang dari bapak dan ibu sama pentingnya. Jadi, setiap orang Bugis dikelilingi oleh kerabat yang berasal dari dua cabang, garis bapak maupun garis ibu.¹⁰ Keberhasilan Bahar yang juga berlatar belakang Suku Bugis menjadi anggota legislatif, terutama adalah kemampuannya mengaktifkan jaringan sesama orang Bugis, yang tidak dibatasi oleh marga tertentu dengan karakteristik konstituen penduduk pedesaan yang secara tradisional terikat dengan tempat tinggalnya, asal-usul daerah (pendatang dari Makassar), dan agama.

Interaksi yang dibangun untuk mempertemukan identitas yang berbeda dari konstituen memerlukan sebuah situasi yang cair dalam keakraban sosial. Konsolidasi antara pendukung lewat momen seremonial dan siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan dan kematian menjadi saluran-saluran dalam proses interaksi yang melibatkan banyak identitas. Melalui pertemuan-pertemuan seperti itu Bahar bisa bertemu hampir seluruh warga dari beragam identitas. Cara ini terbukti menciptakan suasana kekeluargaan dan membuat ikatan emosional dengan pemilihnya dari latar belakang yang berbeda.

Selain melakukan interaksi dengan warga dan konstituen secara informal, interaksi secara formal juga dilakukan melalui kegiatan reses. Hal ini penting karena banyak masyarakat desa di Kecamatan Marangkayu baru mengenal reses sejak Bahar menjabat anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya tidak ada satupun anggota dewan yang mengunjungi basis konstituennya. Warga mulai memahami bahwa pada masa reses tersebut anggota Dewan sedang menyerap aspirasi dan harapan masyarakat pendukungnya.

Menjadi Anggota Dewan di Provinsi

Model Caleg berdasarkan 'paket' kembali dilakukan ketika Bahar ingin maju ke DPRD Provinsi dan Darlis maju ke DPR RI. Namun proses ini tidak berjalan lancar karena Darlis gagal menjadi anggota legislatif DPR RI, sedangkan Bahar berhasil di Provinsi Kalimantan Timur. Di daerah yang pernah menjadi dampungannya ketika menjadi aktivis dan anggota DPRD Kabupaten, Bahar memperoleh 9.573 suara. Di Kecamatan Marangkayu mendapatkan 2.773 suara, Kecamatan Muarabadak 2.179

¹⁰ Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris. 2006

suara, dan Kecamatan Anggana 2.248. suara, dengan total dari 3 kecamatan tersebut 7.200 suara. Di tiga kecamatan inilah hampir semua proyek infrastruktur dan program populis Bahar dijalankan ketika menjadi anggota legislatif kabupaten. Tidak heran, 80 persen suara yang diperolehnya pada saat bertarung di level Provinsi berasal dari ketiga kecamatan, yaitu Marangkayu, Muarabadak, dan Anggana. Strategi tidak terlalu melebarkan sayap ke kecamatan lain adalah untuk menjaga investasi sosial dan politik yang dibangun bertahun-tahun. Konsentrasi di tiga kecamatan juga dilakukan untuk mengintensifkan komunikasi dan interaksi dengan konstituen. Disamping itu, untuk menjamin program-program kesejahteraan yang bersifat *clubs goods* tepat sasaran dan terkontrol.

Strategi kemenangan yang dilakukan Bahar tidak dapat dilepaskan dari latar belakangnya ketika menjadi aktivis lingkungan. Bahar pernah menjadi surveyor di lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sehingga memudahkannya untuk membentuk semacam tim survei untuk pemetaan perkiraan suara. Selain itu juga memiliki pengalaman menjadi tim sukses Darlis Pattarongi dengan mengkoordinir saksi-saksi di TPS, melatih pengawas, dan pemantau Pemilu. Tim yang dibentuk bertugas memetakan perkiraan suara di setiap TPS yang kurang lebih untuk pemungutan suara di 3 Rukun Tetangga. Kerja tim tersebut memiliki akurasi yang cukup baik, misalnya ketika tim surveyor menyebutkan akan ada 116 suara di wilayahnya, pada saat pemungutan suara di TPS tersebut Bahar mendapatkan 115. Selain itu tim juga mengumpulkan data mengapa orang memilih Bahar dan mengapa tidak. Bagi yang tidak memilih didiskusikan bersama tim bagaimana caranya agar yang bersangkutan memberikan pilihannya dengan cara mencari informasi siapa orang terdekatnya yang dapat didatangi tim sukses. Orang dekat ini kemudian memberikan pemahaman apa saja yang telah dikerjakan Bahar selama menjadi anggota DPRD atau yang dikenal dengan istilah *credit claiming*. Orang dengan mudah menentukan pilihan jika melihat 'bukti nyata, seperti jalan di lingkungannya bagus, jalan desanya beraspal, parit-parit ditata, bantuan-bantuan alat pertanian dan perahu rutin diberikan dan lain sebagainya.

Sementara itu, relawan untuk menjaga suara di TPS adalah tanggung jawab perseorangan para Caleg. Disini peran utama pendukung untuk memastikan calonnya memenangkan pemilihan di 3 kecamatan agar tidak ada suara yang hilang. Pada awalnya Bahar mempercayakan kepada fungsionaris partai untuk mengkoordinir saksi. Namun, cara ini juga ada persoalan karena koordinator relawan di kecamatan biasanya Caleg juga. Pada saat suaranya jelek mereka akan meninggalkan, yang bertahan hanya suaranya yang tinggi yang punya peluang menang. Sedangkan saksi-saksi di Kecamatan tidak saling mengenal karena koordinatornya adalah Caleg semua. Ketika suara Calegnya jelek dan ditinggalkan oleh saksinya, suara inilah yang berpotensi hilang dan disalahgunakan oleh penyelenggara. Ketika suara tersebut hilang, Caleg dari partai yang sama sudah pasti kalah maka mereka tidak akan melakukan protes. Dari

pengalaman ini pendukung Bahar melakukan inisiatif untuk menjadi petugas di TPS yang ada di seluruh basis suara.

Dukungan Basis Tradisional

Kelompok-kelompok berbasis mata pencaharian yang dulunya diorganisir untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan Migas kemudian digerakkan untuk menjadi basis politik. Setiap kelompok kelompok tani maupun nelayan yang diorganisir kurang lebih memiliki 30 anggota. Bila Ketua Kelompok mengarahkan dukungan untuk salah satu calon, maka seluruh anggota dipastikan akan mengikuti. Penduduk satu desa di Kutai Kartanegara jumlahnya kurang lebih 400 kepala keluarga (KK) atau secara keseluruhan 2.500 jiwa. Dengan 30 anggota kelompok tani dan nelayan maka setidaknya 300 KK dari satu desa dapat menjadi basis suara. Berdasarkan hitungan kasar, bila satu KK menyumbangkan dua suara maka akan diperoleh 600 suara di setiap desa. Strategi pemenangan juga dilakukan melalui kepala dusun. Pada setiap pertemuan yang digelar di dusun-dusun, Bahar selalu datang menyampaikan apa saja kebutuhan rakyat yang bisa dibantu, apa yang harus dia perjuangkan untuk membangun desa.

Sementara itu, karakteristik daerah yang dikunjungi pada saat kampanye berbeda-beda. Misalnya orang di sekitar Kawasan Bukit Suharto kalau didatangi cenderung tidak banyak bicara, hanya melihat uang saja, siapa memberikan banyak uang maka dipilih. Sikap masyarakat tersebut tidak bisa disalahkan karena tidak ada anggota Dewan yang menjelaskan tentang tugasnya seperti apa. Selain itu, tidak pernah ada anggota Dewan yang memberikan pemahaman tentang kebutuhan pembangunan masyarakatnya untuk perbaikan jalan, misalnya.

Hal ini berbeda dengan warga basis pendampingannya, selama bertahun-tahun yang ada di tiga kecamatan seperti yang disebut di atas, setiap ada Caleg masuk ke desa, mereka didorong agar mau melakukan perubahan. Caleg-caleg yang datang ke masyarakat, akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan: apa yang bisa mereka lakukan untuk membangun desa, apa program yang akan mereka lakukan jika caleg ingin dipilih, apa kebutuhan yang bisa dibantu ketika warga menghadapi masalah. Hal yang menarik disini adalah hampir tidak ada warga yang menanyakan tentang “amplop” yang dibagi caleg ketika melakukan kampanye, namun program apa yang mereka bawa dan dengan cara apa.

Menjadi penting disini, dalam komunikasi memberikan pemahaman bahwa politik uang dapat menjerumuskan pemilih. Misalnya, kalau ada kandidat yang membayar 50 ribu untuk satu suara, maka setelah terpilih bisa saja si calon tidak akan punya kewajiban dan kontrak dianggap selesai. Praktik semacam ini membuat masyarakat tidak percaya bahwa ketika suara yang sudah dibeli berujung tidak adanya tindak lanjut. Dalam hal ini tidak ada kontrol dan tidak ada timbal balik berupa program maupun kegiatan yang turun ke masyarakat. Oleh karena itu, tokoh

masyarakat yang faham politik semacam ini seharusnya mendorong keberhasilan Caleg bersikap jujur, disamping popularitas juga penting. Pengalaman buruk masyarakat terhadap praktik *money politic* membuat mereka faham mengapa desanya dan penghidupannya tidak berubah. Dalam hal ini, konstituen Bahar selalu mengkampanyekan Caleg harus mau berjuang untuk kepentingan warga desa, bukan memberi uang pada saat pencoblosan.

Sebagai mantan Kepala Desa, Bahar mengenal baik apa saja persoalan masyarakat di desanya, termasuk usulan masyarakat dengan program-program Musrenbang. Oleh karena itu, aparat desa harus menjaga kesesuaian Musrenbang dan masa reses Dewan sehingga dapat dibantu dengan cara-cara yang legal. Masa reses disinkronkan dengan RPJM Desa. Akan tetapi jika tidak sinkron maka akan digelar pertemuan sampai menemukan titik terang. Disamping itu, Bahar rajin mengunjungi konstituen dan komentar-komentar dia di surat kabar tentang penyelewengan yang terjadi di pemerintah. Sedangkan anggota Dewan lainnya tidak pernah seperti Bahar. Kalaupun mereka muncul ke desa, dipastikan pada saat acara penyerahan bantuan ke desa, atau menghadiri perayaan tertentu.

Sementara itu, strategi pemenangan saat pemilihan legislatif di tingkat Provinsi adalah modal yang sudah dimiliki Bahar, dengan menggunakan strategi menunjukkan apa yang sudah dikerjakan ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten berupa pembangunan jalan desa. Disamping itu, Bahar selalu menjelaskan prosedur anggaran yang dimiliki Dewan, salah satunya adalah dana aspirasi. Anggaran inilah yang dimanfaatkan untuk konstituen melalui program-program yang bersifat *club goods*. Konstituen diberi informasi bahwa setiap anggota Dewan memiliki anggaran untuk Musrenbang, Reses, Perjalanan Dinas, dan Dana Aspirasi. Dana-dana tersebut adalah untuk hak konstituen, sedangkan hak Dewan adalah gaji bulanan.

Informasi mengenai penganggaran seperti ini, selama ini ditutupi oleh anggota Dewan, seperti misalnya soal berapa jumlah uang dan bagaimana mereka membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, bagaimana peran anggota DPRD untuk menyejahterakan masyarakat melalui program dan kegiatan juga tidak pernah disosialisasikan, seolah tidak punya kewajiban kepada konstituennya. Berbeda dengan anggota Dewan yang lain, ketika masa reses, Bahar menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi dengan warganya. Mengajari mereka tentang pendidikan politik, teknis mendapatkan bantuan pemerintah dan cara mengelolanya. Bahar juga sebagai tempat konsultasi jika ada permasalahan-permasalahan di desa, sampai pada persoalan bahwa bantuan sifatnya tidak bisa diberikan kepada perseorangan, namun kepada kelompok.

Dukungan kepada Bahar juga datang dari kalangan muda yang tergabung dalam kelompok mahasiswa Kecamatan Marangkayu dan Muarabadak yang melakukan studi di Kota Samarinda. Mereka mendukung karena dianggap memiliki visi dan misi perubahan masyarakat ke arah lebih baik sehingga memberi peran nyata ke masyarakat, termasuk banyaknya anak putus sekolah karena persoalan kemiskinan.

Bahar juga memfasilitasi mereka yang putus sekolah agar dapat bantuan biaya dari pemerintah.

Penutup

Dalam kondisi representasi kepemimpinan selama ini, yang dimonopoli oleh kepentingan elite politik, dukungan aktor-aktor alternatif dan kelompok terorganisir dalam struktur negara perlu diperjuangkan dan diupayakan sebaik mungkin, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Disamping itu, perlunya identifikasi kandidat pemimpin rakyat secara cermat dengan berbagai inisiatif dan dukungan terhadap seorang kandidat dengan latar belakang aktivis, disamping juga perlu dibangun jaringan dengan konstituennya untuk mendorong perubahan melalui saluran-saluran demokrasi yang telah dibuka lebar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan karena pemberian barang, uang dan jasa kepada calon pemilih kadang problematik karena kandidat tidak dapat menjamin akan kembali dalam bentuk dukungan suara.¹¹ Selain itu tidak semua pemilih merasa wajib untuk mengembalikannya dalam bentuk suara, karena merasa tidak ada yang mengikat. Kajian Institute for Strategic Initiatives (2014) menunjukkan bahwa pemilihan jenis bantuan akan memiliki daya mengikat pemilih yang berbeda-beda¹². Bantuan berupa *public goods*, *clubs goods*, dan *private goods* akan direspon secara berbeda oleh pemilih. Selain itu kemampuan monitoring dan jaringan operator penyalur bantuan juga menentukan berhasil tidaknya mengikat pemilih. Di Kalimantan Timur Bahar memperkuat dan mengikat relasi dengan menyalurkan bantuan melalui tokoh masyarakat yang memiliki otoritas keagamaan seperti tokoh agama dan tokoh adat Bugis maupun Tana Toraja. Bagi masyarakat Bugis, suku tempat Bahar berasal, salah satu tugas pemimpin adalah mendistribusikan kekayaan/sumberdaya ekonomi kepada pengikutnya.¹³ Hal ini memberikan keuntungan ganda, tokoh masyarakat mendapatkan legitimasinya dan kandidat mendapatkan operator yang dapat melakukan monitoring terhadap bantuan-bantuan yang telah disalurkan.

Penguatan organisasi akar rumput di daerah perlu dilakukan untuk mendorong ke arah gerakan sosial yang lebih luas karena meski demokrasi telah dibuka lebar namun tetap dikuasai oleh elite yang semakin terkonsolidasi dan menggunakan kekuatan-kekuatan represi untuk menguasai sumber daya. Kurangnya sumber daya

¹¹ Aspinall, Edward, dan Sukmajati, Mada (ed). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov. 2015

¹² Djani, Luky. Hendri, Febri. Saputro, Putut Aryo. *Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye*. Jakarta: Institute for Strategic Initiatives (ISI). 2014

¹³ Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris. 2006

ekonomi untuk mobilisasi dukungan bagi kalangan aktivis yang maju di elektoral perlu diimbangi dengan penguatan modal-modal yang lain (modal sosial, simbolik dan modal kultural). Potensi ini sangat besar untuk dimanfaatkan mengingat hasil survei demokrasi menunjukkan modal ekonomi tidak selamanya menjadi strategi paling penting untuk memenangkan pemilu.¹⁴

Sebagai bentuk rekomendasi kebijakan, relasi dan interaksi yang berpotensi menumbuhkan modal sosial harus menjadi pijakan awal bagi partai politik untuk menilai kandidat yang layak maju dalam pemilihan umum. Berdasarkan temuan di lapangan, hal ini tidak dapat dilakukan secara instan namun membutuhkan investasi jangka panjang dan membutuhkan komitmen bahwa partai politik secara terbuka memberikan pilihan calon-calon terbaiknya kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik harus menjadi ciri utama komunikasi antara kandidat dengan konstituen. Terakhir, partai politik harus menyadari bahwa konstituen tidak pernah berhenti menilai peran nyata duta politiknya dalam melakukan intervensi terhadap kebijakan publik yang selama ini dinilai kurang berpihak pada masyarakat bawah.

¹⁴ Savirani, Amalinda & Olle Tornquist. *Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*. Polgov UGM. 2016